

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
(Studi Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong
Kabupaten KutaiKartanegara)**

M.Firmansyah¹, Jamal Amin^{2,3}, Bambang Irawan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui seberapa jauh peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bendang Raya di Kecamatan Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara. 2) Menemukan Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program desa mandiri tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:176). Hasil Penelitian adalah : 1) Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sudah melaksanakan perannya sebagaimana termuat pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri yaitu sebagai Tim Koordinasi, monitoring evaluasi dan pengendalian Program Desa Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Realisasi Program atau kegiatan yang direncanakan didalam mewujudkan Desa Mandiri oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sudah terlaksana 100% sesuai dengan indicator yang terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri. Selanjutnya untuk factor pendukung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didalam pelaksanaan Program Desa Mandiri adalah tersedianya anggaran atau dana didalam pelaksanaan Program Desa Mandiri. Sedangkan untuk Faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman aparatur desa didalam menyambut pelaksanaan Program Desa Mandiri sehingga didalam percepatan pembangunan baik dari segi inprastruktur maupun perekonomian didesa menjadi terhambat.

Kata Kunci: Peran BAPEMAS DAN PEMDES, Pemberdayaan aparatur, Desa Mandiri.

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

²Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Abstract

The aims for this research are: 1) to figure out the role of Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (Bapemas) to implement the program of Desa Mandiri in Bendang Raya Village, Tenggara Sub-District, Kutai Kartanegara Regency. 2) to find supporting and hidering factors in implementing the program. To analyze the data, interactive analyzing model as developed by Miles and Huberman (1992:176) will be used. The result shows that : 1) Bapemas and Pemdes (Village Government) have implemented the program as stated in Peraturan Bupati (Law of the Head of Regency) No.31 Year 2012 regarding the Mechanism In Implementing The Program Of Desa Mandiri such as coordinating, monitoring, evaluating, and controlling the program, 2) The realization of the program has been fully conducted as the indicators stated in the Law of the Head of Regency mentioned above. The supporting factor in implementing the program is the availability of sufficient funding while the hindering factor is the lack of understanding some of the officials of the Village in implementing the program so that the development in infrastructure and economy be hindered

Keyword: *The role of Bapemas and Pemdes, Officials Endeavoring, Desa Mandiri*

Pendahuluan

Pemerintahan Desa dalam sistem Pemerintahan Indonesia merupakan level pemerintahan terendah dan dalam kondisi tidak berdaya (powerless). Meski begitu, Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisi Pemerintahan Desa masih belum optimal mengingat masih rendahnya pendidikan para aparat Pemerintahan Desa. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dengan segala keterbatasan yang dimiliki, para aparat desa tersebut harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa harus jauh lebih penting lagi dalam pemberdayaan aparatur desa dalam hal ini adalah semua perangkat desa dari lurah, RT dan semua Pamong – pamong Desa. Mereka semua perangkat Desa merupakan mesin penggerak utama dalam sebuah tatanan pengelolaan Desa. Untuk menjamin pelayanan publik di Desa berjalan optimal maka perangkat desa harus peduli tentang bagaimana mengelola desa mereka sendiri dengan efektif dan efisien. Tentunya ini membawa isyarat pemberdayaan yang lebih diutamakan adalah pemberdayaan aparatur desa kemudian setelah itu dilakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Bedang Raya Kecamatan Tenggara merupakan desa yang berjarak 10 km dari ibu kota kabupaten Kutai Kartanegara, dari segi pembangunan bisa dikatakan desa ini masih jauh tertinggal dan masih belum berdaya, hal ini dapat dilihat dari segi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas sosial yang masih sangat minim. Disamping itu kapasitas aparatur desa dalam

menjalankan penyelenggaran pemerintah desa masih banyak menuai kendala seperti dalam penyusunan rencana pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) , pelayanan administrasi kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sedangkan program Desa Mandiri oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Desa Bendang Raya di duga sementara memiliki beberapa hambatan yaitu :

1. Masih kurangnya koordinasi program terkait dalam Program Desa Mandiri di kabupaten kutai Kartanegara
2. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam hal persiapan sumber daya aparaturnya
3. Belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri.

Denganadanya Program DesaMandiri yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan permasalahan pemberdayaan masyarakat, keteringgalan pembagunan, dan administrasi penduduk yang terjadi di Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong dapat diatasi

Kerangka Pemikiran

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Didalam Program Desa Mandiri.

Merton dalamRaho (2007 : 67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sedangkanWirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan denganperanan yang dipegangnya.

Program Desa Mandiri, adalah program pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran dan tujuan sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program Desa Mandiri sebagai mana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 adalah desa yang dinilai sangat kurang atau belum mampu seperti kemiskinan, rendahnya akses ekonomi, rendahnya kualitas kesehatan atau pendidikan.

Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh program Desa Mandiri dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Mengacu kepada kamus istilah sosiologi (2001 : 108) adalah : “Desa berasal dari bahas sansekerta “Des” yang artinya tanah air,tanah asal atau tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipulau jawa, madura, bali sedangkan dipulau lainnya dikenal dengan istilah untuk daerah yang setingkat : dusun (Sumatra Selatan), dusun Dati (Maluku), Nagari Dari (Minangkabau). Dan lain-lain.

Dalam UU No. 6 / 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Bachrawi Sanusi (2004 : 59) yaitu : Pembangunan desa adalah Upaya nyata yang dilaksanakan disuatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.Haryono Sudriamunawar (2002 : 96) mengatakan bahwa : “ Pembangunan desa adalah program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan di desa untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di desa sehingga menjadi desa mandiri “.

Ali Hanapiah, (2011:9) pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya – upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuanpemerintah maupun organisasi – organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik

Adapaun terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur–unsur penguatayang diserap dari luar. Menurut Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:33) Pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya” tetapi juga “kekuasaan” sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu” tetapi juga “mempunyai kuasa”. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”.Menurut Sumodiningrat (1999:40), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Samodra Wibowo dalam bukunya *Negeri-Negeri Nusantara dari Modern Hingga Reformasi Administrasi* mengemukakan pemberdayaan aparaturyaitu: peningkatan efektifitas, mengkhendaki dilakukannya

perubahan administrasi (birokrasi) atau reformasi kinerja aparatur pemerintah (Wibowo, 2001:200). Definisi pemberdayaan aparatur juga dikemukakan oleh Widjaja yaitu pemberdayaan aparatur pemerintah segala usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan (Widjaja, 1995:60). Pemberdayaan aparatur adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karir, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur Negara disertai tugas dalam suatu jabatan (Sarundajang, 1997:214).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah *key informan*, sebagai sumber data utama dipilih secara *purposive sampling*. Fokus penelitiannya adalah pelaksanaan program desa mandiri oleh Bapemas pada desa bendang raya kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah : (1) Peran Bapemas dan Pemdes sebagai koordinator, monitoring dan evaluasi program desa mandiri di kabupaten kutai kartanegara, (2) Realisasi program kerja Bapemas dan Pemdes dalam pemberdayaan aparatur desa bendang raya, (3) Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Bapemas dan Pemdes dalam pemberdayaan aparatur Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Bendang Raya

Desa Bendang Raya adalah gabungan dari Dusun Lamin Datu dan Dusun Bendang Raya, sebelum adanya pemekaran desa merupakan salah satu dusun dari wilayah Desa Rapak Lambur, keinginan masyarakat Desa Bendang Raya untuk melakukan pemekaran desa, mengingat wilayah Desa Rapak Lambur yang begitu luas sementara penduduk dan area perkembangan pertanian meningkat di ke dua dusun tersebut, ditambah lagi dengan pembangunan tidak merata. Luas wilayah Desa Bendang Raya 2582 Ha, jumlah penduduk 837 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 268 KK dan memiliki kepadatan penduduk 12 jiwa/km. Jarak dari ibu kota kabupaten atau kecamatan Tenggarong sejauh 10 (sepuluh) Km dengan jarak tempuh berkendara 1 (satu) Jam. Lokasi Desa Bendang Raya berbatasan sebagai berikut:

1. sebelah utara : Desa Beloro Kecamatan Sebulu,
2. sebelah selatan : Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong,
3. sebelah timur : Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong,
4. sebelah barat : Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong,

Tabel 1 Penduduk berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	439 jiwa	53%
2	Perempuan	398 Jiwa	47%
	Jumlah	837 jiwa	100%

Sumber: profil desa bendang raya

Berdasarkan tabel 1 penduduk desa bendang raya terdiri 837 jiwa, penduduk dengan jenis kelamin pria sebanyak 439 jiwa atau 53% sedangkan penduduk dengan jenis kelamin wanita sebanyak 398 jiwa tau 47%.

Tabel 2 penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Belum masuk TK	6	3
2	Usia 3-6 Sedang Tk/Play Group	6	5
3	Usia 7-18 Tidak pernah Sekolah	0	1
4	Usia 7-18 yang sedang sekolah	53	49
5	Usia 18-56 tidak pernah sekolah	208	193
6	Usia 18-56 Pernah SD tetapi tidak Tamat	13	13
7	Tamat sederajat	55	65
8	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	13	7
9	Usia 18-56 tidak tamat SLTA	17	9
10	Tamat SMP/Sederajat	42	31
11	Tamat SMA/Sederajat	23	22
12	Tamat S1/ Sederajat	3	0
Jumlah Total		837 jiwa	

Sumber: profil desa Bendang Raya

Tabel 2 mendeskripsikan bahwa sebanyak 401 orang atau sebesar 48% penduduk laki-laki dan Perempuan usia 18-56 tahun desa bendang raya tidak pernah sekolah, berikutnya sebesar 120 orang atau 14,3% penduduk laki-laki dan perempuan tamat SD/sederajat, dan hanya 3 orang atau 0,35% yang tamat perguruan tinggi.

Tabel 3 Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	130	68
2	Pegawai Negeri sipil	4	0
3	Pengrajin	1	1
4	Peternak	3	0
5	Pedagang Keliling	23	0
6	Karyawan perusahaan swasta	36	0
Jumlah total penduduk		266	

Sumber: profil desa Bendang Raya

Tabel 3 bahwa penduduk desa bendang raya mayoritas laki-laki dan perempuan berprofesi sebagai petani sebanyak 198 orang, berikutnya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta sebanyak 36 orang dan pedagang keliling sebanyak 23 orang

Pembahasan

Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Program Desa Mandiri Antar SKPD.

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan berhubungan dengan pekerjaan, jika dikaitkan dengan Bapemas dan Pemdes dalam program desa mandiri kabupaten kutai kartanegara tidak lain adalah fungsi bapemas dan pemdes dalam Program tersebut yaitu selaku Koordinator, monitoring, evaluasi dan pengendalian. Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinator (coordinator sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dalam Program Desa Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan lintas sektor sebanyak 21 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga diperlukan Koordinator dimana koordinator berfungsi melakukan sinergitas antar SKPD yang ada. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Drs. Kasim Kepala Bidang Keuangan Desa dan Aset Desa Bapemas dan Pemdes:

“Bahwa peran koordinator yaitu menyusun program yang diusung oleh SKPD untuk desa mandiri agar terjadi sinkronisasi program kerja bersama-sama melibatkan 21 SKPD lainnya”.

Dari hasil wawancara dan teori yang di kemukakan maka peran koordinator yang dilakukan Bapemas dan Pemdes sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Monitoring Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Didalam Mewujudkan Program Desa Mandiri

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasal 1, disebutkan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan hasil wawancara Drs. Kasim Kepala Bidang Keuangan Desa dan Aset Desa Bapemas dan Pemdes. Menurut beliau

“Monitoring merupakan tugas terpadu oleh pemerintah daerah namun tetap dikordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012 Pasal 15. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara tim bapemas dan pemdes turun kelapangan secara berkala setiap tiga bulan sekali per triwulan semenjak program desa mandiri ini bergulir

tahun 2012. Pada saat dilapangan tim menanyakan kepada aparat desa perihal SKPD yang telah melaksanakan kegiatan program desa mandiri sesuai dengan lampiran perbup no 31 tahun 2012.

Adapaun monitoring tersebut menemukan permasalahan yang terjadi sebagaimana hasil wawancara dengan bapak salom, SE selaku petugas monitoring dari Bapemas dan Pemdes.

“Temuan menarik dari hasil monitoring di beberapa desa adalah adanya kegiatan program desa mandiri yang kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, seperti adanya bantuan ternak atau bibit yang diterima langsung oleh masyarakat desa melalui UPTD dinas tersebut tanpa diketahui atau dikoordinasikan kepada kepala desa atau pihak desa lainnya”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan monitoring sudah berjalan dengan dilakukan 3 bulan sekali. Hasil monitoringpun digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program seperti adanya pelaksanaan program desa mandiri oleh beberapa SKPD yang tidak dikoordinasikan dengan pihak aparat desa.

Evaluasi Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh 21 SKPD Terkait Program Desa Mandiri

Hal berikutnya yang dilakukan adalah evaluasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasal 1 evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran output, dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ir. Tumiar Manurung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

“Program Desa Mandiri Pada Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi dengan jalan membandingkan pelaksanaan Program Desa Mandiri setiap 3 bulan dengan indikator yang telah ditetapkan”.

Fungsi evaluasi yang membandingkan antara hasil dilapangan dengan standar indikator yang direncanakan masih belum maksimal, dari 21 SKPD yang terlibat dalam program desa mandiri hanya 4 SKPD yang mencapai pelaksanaan program desa mandiri sesuai dengan kriteria dan indikator standar yang termuat dalam lampiran Perbup 31 tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun SKPD yang berhasil mencapai 100% sesuai kriteria tersebut adalah sebagai berikut; (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (3) Badan Kearsipan dan Perpustakaan dan, (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Evaluasi tersebut juga dilakuan per semester atau setiap 6

bulan sekali dimana hasil temuan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi evaluasi tersebut.

Pengendalian Program Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Terhadap 21 SKPD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasal 1 pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin suatu program sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Kasim Kepala Bidang Keuangan Desa dan Aset Desa Bapemas dan Pemdes terkait masalah pengendalian telah dilakukan dengan jalan melakukan monitoring setiap triwulan atau 3 bulan sekali sedangkan hasil-hasil monitoring akan dilakukan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan SKPD lainnya setiap 6 bulansekali.

Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikuntodan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Bpk Kasim bahwa “Dalam rapat evaluasi terdapat kendala yang dihadapi, evaluasi dalam rapat koordinasi hanya dihadiri oleh staf masing-masing SKPD, sehingga untuk mengambil keputusan sangat sulit”.

Dari hasil wawancara dan kerangka teori yang ada maka dapat dikatakan proses pengendalian sudah dilakukan lewat monitoring dan evaluasi (monev) akan tetapi tindak lanjut dari monev belum dilakukan oleh masing-masing SKPD yang terlibat dalam program desa mandiri.

Dari informasi diatas dapat diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah merealisasikan Program DesaMandiri di Desa Bendang Raya sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dalam Perbup 31 tahun 2012.18 program tersebut 6 program untuk tertib administrasi desa, 8 program untuk penguatan kelembagaan ditingkat desa, 1 program pendampingan perencanaan pembangunan desa, dan 3 program untuk pembentukan badan usaha di tingkat desa sebagai berikut:

Tabel 4.7 Program Kegiatan Bapemas dan Pemdes dalam mewujudkan Desa Mandiri.

No	Program PemberdayaanAparatur	Indikator
1	Cetak buku register	1. Tertib administrasi pemerintahan dan keuangan desa
2	Bimtek Penguatan profil	2. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

3	Bimtek operator profil	3. Meningkatnya daya serap ADD 4. Mekanisme pergantian lembaga pemerintahan yang baik
4	Pelatihan penyusunan Kerangka Acuan Kerja APBDes	
5	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	
6	Monitoring dan pembinaan pengelolaan keuangan desa	
7	Studi komparatif peranan lembaga adat desa terhadap program desa mandiri	1. Pembinaan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan di desa 2. Semakin berperan dan berfungsinya LPM, KPM, PKK dan lembaga adat
8	Pelatihan peranan lembaga adat terhadap program desa mandiri	
9	Monitoring dan pembinaan KPM desa mandiri	
10	Pembinaan dan penguatan kinerja TP PKK desa	
11	Pembinaan dan penguatan kinerja kader pengelola posyandu	
12	Bimtek kelembagaan pemberdayaan masyarakat (rukun tetangga)	
13	Bimtek kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	
14	Pembinaan dan penguatan karang taruna	
15	Pendampingan Musrenbangdes	Peningkatan kualitas aparatur dalam perencanaan pembangunan desa
16	Sosialisasi pembentukan BUMDes	Terbentuknya kelembagaan ekonomi perdesaan (BUMDes) dalam peningkatan perekonomian masyarakat
17	Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes	
18	Pembinaan dan pembentukan BUMDes di desa target untuk desa mandiri	

Sumber: *LaporanBapemasPemdesPelaksana Program DesaMandiri*

Dalam program desa mandiri di desa Bendang Raya program-program kerja Bapemas dan pemdes suda hterealisasi semua sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masih ada kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Faktor penghambat:

1. Kurang kordinasi dan adanya ego sektoral mewarnai dalam pelaksanaan program tersebut
2. Pemahaman aparatur desa bendang raya masih lemah dalam implementasi program yang telah dilakukan bapemas dan pemdes

Ditengahhambatantersebutbapemasdanpemdesberupaya agar program berjalan sesuai dengan indicator yang ditetapkan selebihnya adanya factor pendukung juga menjadi kunci sukses keberhasilan program tersebut sebagai berikut:

Faktor pendukung:

1. Tersediannya regulasi yang jelas dalam pelaksanna program desa mandiri yaitu perbup 31 tahun 2012
2. Tersedianya anggaran untuk pelaksanna program desa mandiri
3. Komitmen masing-masing bidang untuk melaksanakan program desa mandiri

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapemas di dalam Perbup 31 Tahun 2012, Bapemas sudah berperan sebagai koordinator, monitoring evaluasi dan pengendalian Program Desa Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil pengendalian Program Desa Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui monitoring dan evalusi (Monev) hanya 4 Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhasil melaksanakan Program Desa Mandiri sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kearsipan dan Perpustakaan dan, termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pada Desa Bendang Raya program kegitan Desa Mandiri yaitu pemberdayaan aparatur yang dilakukan oleh pihak Bapemas dan Pemdes telah terealisasi dan sesuai dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut berupa 18 program; 6 program untuk tertib administrsi desa, 8 program untuk penguatan kelembagaan ditingkat desa, 1 program pendampingan perencanaan pembangunan desa, dan 3 program untuk pembentukan badan usaha di tingkat desa.

Faktor yang mendukung keberhasilan Bapemas dan Pemdesa dalam pemberdayan aparatur Program Desa Mandiri di Desa Bendang Raya adalah terdapatnya regulasi yang jelas sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012 dan tersedianya anggaran yang cukup, sedangkan faktor penghambat dari kegiatan tersebut ialah kurangnya koordinasi antar bidang pada Bapemas dan Pemdes dan kurangnya kesadaran aparatur dalam urgensi kegitan Desa Mandiri ini.

Saran-Saran

Diharapkan kepada Bapemas dan Pemdes selaku koordinator Program Desa Mandiri untuk dapat memperbaiki strategi pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada beberapa desa sesuai dengan tahun kerja dan zona pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hulu-tengah-pantai.

Diharapkan kepada 21 SKPD yang terlibat dalam kegiatan Program Desa Mandiri dapat dilakukan rapat-rapat koordinasi untuk sinkronisasi program dan evaluasi progress kegiatan yang ditindaklanjuti berdasarkan temuan tim monitoring program.

Diharapkan pihak Bapemas dan Pemdes dapat melakukan evaluasi menyangkut outcome dari kegiatan yang telah terealisasi pada Desa Bendang Raya dan pihak aparat Desa Bendang Raya melalui program pemberdayaan yang telah dilakukan Bapemas dan Pemdes dapat mengelola pembangunan desa sesuai dengan indikator Program Desa Mandiri.

DaftarPustaka

- Anonim, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
_____, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri
- Beryy, David; 1981, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (“The Rules of Sociological Method” New York: Free Press, 1964 edition) disunting oleh Drs. Paulus Wirutomo, M.Sc, Rajawali, Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat, 1999.
Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lexy J. Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhi, Ali Hanapiah 2011, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint
- Raho. Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sarundajang, S.H, 1997, *Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sudriamunawar, Haryono, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Wibowo. Samodra. 2001. *Negeri-Negeri Nusantara dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Widjaja, A.W. 1995. *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.

Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo